

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

##### **2.1.1 Pengertian UMKM**

Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan khusus yang memuat tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria dan bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung dari usaha menengah atau usaha besar (Pemerintah Indonesia, 2008), kriterianya dibedakan sebagai berikut

Tabel II.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

	<b>Kekayaan Bersih</b>	<b>Hasil Penjualan Tahunan</b>
Usaha Mikro	Paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan	Paling banyak Rp300.000.000,00
Usaha Kecil	Lebih dari Rp50.000.000,00 sampai paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan	Lebih dari Rp300.000.000,00 sampai paling banyak Rp2.500.000.000,00
Usaha Menengah	Lebih dari Rp500.000.000,00 sampai paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan	Lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai paling banyak Rp50.000.000.000,00

Sumber : UU Nomor 20 tahun 2008

### **2.1.2 Usaha Mikro**

Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik, industri mikro adalah usaha yang memiliki 1-4 tenaga kerja (BPS, 2021). Menurut pendapat lain dari World Bank yang termasuk kriteria usaha mikro ialah memiliki <10 karyawan, total asset  $\leq$ \$100.000 atau pendapatan tahunan  $\leq$ \$100.000 (Independent Evaluation Group, 2008).

### **2.1.3 Usaha Kecil**

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang. Berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik, industri kecil adalah usaha yang memiliki 5-19 tenaga kerja (BPS, 2021). Menurut pendapat lain dari World Bank yang termasuk kriteria usaha kecil ialah memiliki 10-50 karyawan, total asset \$100.000-\$3.000.000 atau pendapatan tahunan \$100.000-\$3.000.000 (Independent Evaluation Group, 2008).

### **2.1.4 Usaha Menengah**

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik, industri menengah adalah usaha yang memiliki 20-99 tenaga kerja (BPS, 2021). Menurut pendapat lain dari World Bank yang termasuk kriteria usaha menengah ialah memiliki 50-300 karyawan, total asset \$3.000.000-\$15.000.000 atau pendapatan tahunan \$3.000.000-\$15.000.000 (Independent Evaluation Group, 2008).

## **2.2 Laporan Keuangan**

### **2.2.1 Defini Laporan Keuangan dan Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut (Jerry J. Weygandt, 2015) laporan keuangan merupakan sarana utama yang berguna untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak lain diluar entitas. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016) laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas, atau dapat dikatakan sebagai catatan yang menyajikan kegiatan dan kinerja keuangan suatu entitas. Singkatnya laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas yang berguna bagi pihak internal maupun pihak-pihak lain diluar entitas.

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna bagi investor, pemberi pinjaman dan kreditor lain untuk membuat keputusan berkaitan dengan peranan mereka dalam menyediakan sumber daya bagi perusahaan (Jerry J. Weygandt, 2015). Dari

penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang memuat informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Informasi tersebut merupakan hasil kodifikasi berbagai transaksi yang terjadi pada periode bersangkutan dan dapat dimanfaatkan oleh para pengguna dalam pengambilan keputusan.

### **2.2.2 Komponen-Komponen Laporan Keuangan**

Menurut (Jerry J. Weygandt, 2015) laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen

#### **2.2.2.1 Laporan Laba Rugi**

Laporan laba rugi melaporkan profitabilitas operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Penyusunan laporan ini dilakukan dengan menyajikan pendapatan terlebih dahulu diikuti oleh biaya, hasil perhitungan inilah yang menunjukkan laba ruginya suatu entitas

#### **2.2.2.2 Laporan Laba Ditahan (Perubahan Ekuitas)**

Laporan perubahan ekuitas melaporkan perubahan laba ditahan pada periode tertentu. Penyusunan laporan ini dilakukan dengan menyajikan jumlah awal laba ditahan kemudian diikuti laba bersih dan dividen tahun berjalan. Saldo akhir laba ditahan adalah jumlah akhir pada laporan ini.

#### **2.2.2.3 Laporan Posisi Keuangan**

Laporan posisi keuangan melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Total aset yang ditampilkan harus sama dengan total ekuitas dan kewajiban.

#### 2.2.2.4 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memberikan informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu. Laporan ini melaporkan (1) efek kas dari operasi perusahaan selama suatu periode, (2) aktivitas investasinya, (3) aktivitas pendanaannya, (4) kenaikan atau penurunan kas bersih kas selama periode tersebut, (5) jumlah kas pada akhir periode

#### 2.2.2.5 Laporan Laba Rugi Komprehensif

Selain melaporkan laporan laba rugi, suatu entitas juga harus menyiapkan laporan laba rugi komprehensif jika memiliki pendapatan komprehensif lainnya. Pos pendapatan komprehensif lainnya merupakan bagian dari laba bersih tetapi dianggap cukup penting untuk dilaporkan secara terpisah.

### **2.3 SAK EMKM**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) bisa dikatakan merupakan bentuk sederhana dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) menyadari peran penting UMKM dalam perekonomian nasional, oleh karena itu pada 2009 dibuatlah SAK ETAP yang diintensikan untuk digunakan membantu pelaporan keuangan usaha kecil dan menengah. Pada perkembangannya, terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan berbasis IFRS dan SAK ETAP. Berangkat dari hal ini, DSAK IAI kembali membuat standar yang lebih sederhana dari SAK ETAP dengan hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan

oleh UMKM dan menggunakan dasar pengukuran biaya historis. Akhirnya pada 2016 diterbitkanlah SAK EMKM dengan tujuan mempermudah UMKM yang belum bisa menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya.

SAK EMKM dimaksudkan digunakan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP, yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya 2 tahun berturut-turut. Pada paragraf 3.8 SAK EMKM dijelaskan bahwa entitas menyajikan laporan keuangan secara komparatif yaitu dengan membandingkan dengan informasi pada satu periode sebelumnya. Sedangkan paragraf 3.9 SAK EMKM menyebutkan bahwa laporan keuangan minimum terdiri dari (1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode, (2) Laporan laba rugi selama periode, dan (3) Catatan atas laporan keuangan.

### **2.3.1 Laporan Posisi Keuangan**

Berdasarkan paragraf 4.1 SAK EMKM, laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut

#### **2.3.1.1 Aset**

Aset didefinisikan menurut paragraf 2.2 SAK EMKM sebagai sumber daya yang dikuasi oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan. Manfaat ekonomik masa depan suatu aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik

secara langsung maupun tidak langsung, terhadap arus kas yang dapat timbul dari penggunaan maupun pelepasan aset

#### 2.3.1.2 Liabilitas

Liabilitas didefinisikan menurut paragraf 2.2 SAK EMKM sebagai kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus sumber daya ekonomik entitas keluar. Penyelesaian liabilitas ini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain

#### 2.3.1.3 Ekuitas

Ekuitas didefinisikan menurut paragraf 2.7 SAK EMKM sebagai hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Secara umum ekuitas dapat diartikan besaran hak yang dimiliki pemilik perusahaan atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajibannya.

### **2.3.2 Laporan Laba Rugi**

Berdasarkan paragraf 5.1 SAK EMKM, laporan laba rugi merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Unsur dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

#### 2.3.2.1 Penghasilan

Paragraf 2.9 SAK EMKM menyebutkan bahwa penghasilan meliputi pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas normal oleh entitas seperti penjualan. Sedangkan keuntungan mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk pendapatan.

### 2.3.2.2 Beban

Paragraf 2.9 SAK EMKM menyebutkan bahwa beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan kerugian. Beban yang timbul dari aktivitas entitas yang normal seperti beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Sedangkan beban lain yang tidak termasuk kategori beban yang timbul dari aktivitas normal entitas akan dikategorikan sebagai kerugian.

### 2.3.3 Catatan atas Laporan Keuangan

Paragraf 6.1 SAK EMKM menjabarkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memuat

1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM
2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
3. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan

Selain dari apa yang telah disebutkan dalam SAK EMKM CaLK biasanya juga memuat

1. Informasi umum mengenai perusahaan
2. Kebijakan akuntansi dan pos-pos laporan keuangan
3. Informasi kebijakan fiskal/keuangan
4. Ikhtisar pencapaian kerja
5. Pengguna laporan keuangan
6. Informasi lain